



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1120/KPTS/M/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 361/KPTS/M/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 147 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 302/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 361/KPTS/M/2019;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Keamanan Bendungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan memperhatikan kondisi Anggota Komisi Keamanan Bendungan dan kesibukan sebagian Anggota yang masih merangkap pada tugas-tugas lainnya serta perlunya regenerasi Komisi Keamanan Bendungan, perlu penambahan anggota Komisi Keamanan Bendungan dari generasi muda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 361/KPTS/M/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 302/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan ;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 302/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 361/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 361/KPTS/M/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 302/KPTS/M/2019 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN.

- KESATU : Mengubah Susunan Keanggotaan Penasehat dan Keanggotaan Komisi Keamanan Bendungan yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Komisi, dengan menambahkan pejabat yang instansi/namanya tercantum dalam lajur 4 (empat) dan lajur 5 (lima) lampiran Keputusan Menteri ini sebagai penasehat dan anggota Komisi Keamanan Bendungan.
- KEDUA : Ketentuan mengenai Penasehat Komisi Keamanan Bendungan, tugas, tanggung jawab, masa kerja, dan biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 302/KPTS/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 302/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan, dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Deputi III Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian ESDM;
6. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (Persero);
8. Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung;
9. Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar;
10. Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia;
11. Kepala Pusat Bendungan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 November 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

jdih.pu.go.id

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR : 1120/KPTS/M/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT NOMOR
 361/KPTS/M/2019 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR
 302/KPTS/M/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI
 KEAMANAN BENDUNGAN

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PENASEHAT KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN

No	SEMULA		MENJADI		DOMISILI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
	INSTANSI/NAMA	JABATAN	INSTANSI/NAMA	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ir. Ibnu Kasiro, Dipl.HE	Ahli Hidrolika, HATHI	Ir. Ibnu Kasiro, Dipl.HE	Ahli Hidrolika, HATHI	Bandung	Penasehat
2.	Ir. H. M. Sudibyoy, MT	Ahli Hidrolika, HATHI	-	-	-	-
3.	Dr. Didiek Djarwadi, M.Eng	Ahli Kegempaan dan Ahli Geoteknik, HATHI	-	-	-	-

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN

No	SEMULA		MENJADI		DOMISILI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
	INSTANSI/NAMA	JABATAN	INSTANSI/NAMA	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Jakarta	Ketua merangkap anggota
2.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kepala Balai Bendungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kepala Balai Bendungan	Jakarta	Sekretaris bukan Anggota
3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kepala Pusat Bendungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kepala Pusat Bendungan	Jakarta	Anggota
4.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi	Kepala Pusat Sumber Daya Air dan Geologi Lingkungan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi	Kepala Pusat Sumber Daya Air dan Geologi Lingkungan	Jakarta	Anggota
5.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Jakarta	Anggota
6.	PT. Perusahaan Umum Listrik Negara (Pemilik Bendungan)	General Manager PT. PLN (Persero) UIP Pembangkitan Hidro Jawa Bali	PT. Perusahaan Umum Listrik Negara (Pemilik Bendungan)	Executive Vice President Project Management Office, PT PLN (Persero) UIP Pembangkitan Hidro Jawa Bali	Jakarta	Anggota

No	SEMULA		MENJADI		DOMISILI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
	INSTANSI/NAMA	JABATAN	INSTANSI/NAMA	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7
7.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	Jakarta	Anggota
8.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penelitian dan Pengembangan	Kepala Puslitbang. Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penelitian dan Pengembangan	Kepala Puslitbang. Sumber Daya Air	Bandung	Anggota
9.	Ir. Ahmad Rusfandi Usman, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB	Ir. Ahmad Rusfandi Usman, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB	Jakarta	Anggota
10.	Dr. Ir. Bambang Hargono, Dipl.HE., M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Dr. Ir. Bambang Hargono, Dipl.HE., M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Yogyakarta	Anggota
11.	Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Jakarta	Anggota
12.	Dr. Ir. Ni Made Sumiarsih, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Dr. Ir. Ni Made Sumiarsih, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Jakarta	Anggota
13.	Dr. Ir. Paulus Kurniawan, MBA.	Ahli Geologi, HATTI, IAGI	Dr. Ir. Paulus Kurniawan, MBA.	Ahli Geologi, HATTI, IAGI	Jakarta	Anggota
14.	Ir. Tri Bayu Adji, MA.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB	Ir. Tri Bayu Adji, MA.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB	Jakarta	Anggota

No	SEMULA		MENJADI		DOMISILI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
	INSTANSI/NAMA	JABATAN	INSTANSI/NAMA	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7
15.	Dr. Ir. Aries F. Firman, M.Sc.	Dosen Project Management, School Of Bussiness dan Managemet, Institut Teknologi Bandung	Dr. Ir. Aries F. Firman, M.Sc.	Dosen Project Management, School Of Bussiness dan Managemet, Institut Teknologi Bandung	Jakarta	Anggota
16.	Ir. Ketut Suryata	Ahli Hidro Mekanikal, KNIBB	Ir. Ketut Suryata	Ahli Hidro Mekanikal, KNIBB	Jakarta	Anggota
17.	Dr. Ir. Djaya Murni Warga Dalam, Dipl.HE, M.Sc		Dr. Ir. Djaya Murni Warga Dalam, Dipl.HE, M.Sc	Ahli Hidrolika, HATHI	Jakarta	Anggota
18.	Agus Djatiwiryono, ME		Agus Djatiwiryono, ME	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Jakarta	Anggota
19.			M. Duki Malindo, ST. MCM	Ahli Madya Bendungan Besar, KNIBB (dalam proses)	Jakarta	Anggota
20.			Abdul Ghoni Majdi, ST., M.PSDA	Ahli Muda Bendungan Besar, KNIBB	Cirebon	Anggota



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO